

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Kinerja Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) “Banyu Biru” dalam Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan lima indikator kinerja menurut Mathis, R.L. & J.H. Jackson (2006) sebagai berikut:

1. Kuantitas

Peneliti menemukan bahwa dari aspek kuantitas, HIPPAM “Banyu Biru” secara administratif telah mampu melayani sekitar 118 rumah tangga pelanggan aktif dan terus menghadapi tren peningkatan permintaan sambungan baru. Namun, kuantitas output pelayanan ini belum berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas infrastruktur perpipaan serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan operasional seperti perawatan, perbaikan, dan administrasi harian masih terbatas dan dilakukan secara manual konvensional.

2. Kualitas

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas kerja pengelola dinilai masih rendah dan berada pada level yang mengkhawatirkan. Mutu layanan distribusi air bersih dinilai belum memenuhi ekspektasi masyarakat akibat adanya pasokan air yang tidak konsisten, tekanan air lemah pada jam sibuk, dan

kondisi fisik air yang terkadang keruh. Dari sisi kualitas administrasi, ketelitian pengelola masih sangat lemah karena pencatatan keuangan menggunakan buku besar konvensional yang rentan memicu selisih anggaran, serta sistem pengarsipan keluhan pelanggan yang belum tertata baku.

3. Ketepatan Waktu

Peneliti menyimpulkan bahwa dimensi ketepatan waktu pengelola dalam menanggapi gangguan teknis cenderung kurang cepat. Penanganan kerusakan jaringan air bahkan memerlukan waktu tunggu hingga lebih dari 1 hari karena keterbatasan personel teknis yang berjumlah 2 orang dan ketiadaan stok suku cadang di lokasi. Selain itu, kedisiplinan waktu kerja harian pengelola sangat rendah karena posisi lembaga yang non-formal belum mampu memberikan insentif layak, sehingga pengurus lebih mendahulukan pekerjaan pribadi mereka yaitu bertani atau berdagang daripada mematuhi jadwal piket pelayanan.

4. Efektivitas

Aspek efektivitas kinerja HIPPAM “Banyu Biru” dikategorikan belum berhasil dan belum mencapai tujuan organisasi secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kehilangan air akibat kebocoran pipa yang hanya dideteksi secara manual serta lambatnya penanganan stan meteran rusak dan sambungan ilegal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada kerugian finansial HIPPAM “Banyu Biru”. Selain itu, efektivitas dalam penyelesaian masalah operasional dan konflik internal tergolong lambat karena keputusan musyawarah yang diambil cenderung bersifat sementara.

5. Kehadiran

Peneliti menemukan bahwa tingkat kehadiran fisik pengelola menunjukkan sebaran yang tidak merata karena roda organisasi sehari-hari hanya bertumpu pada empat posisi inti yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Teknisi, sedangkan posisi pendukung lainnya hampir tidak pernah terlibat aktif. Kepatuhan terhadap jadwal kerja formal juga dinilai tidak ada karena pengelola menerapkan sistem kerja berbasis panggilan darurat (*on-call*). Absennya aturan absensi dan sanksi tegas menyebabkan produktivitas lembaga tidak optimal dan agenda rutin organisasi sering kali tertunda.

Berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi mendalam yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa Kinerja Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) “Banyu Biru” dalam Pengelolaan Air Bersih Rumah Tangga di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro masih dihadapkan pada hambatan multidimensi yang cukup kompleks sehingga belum mampu mencapai titik performa yang optimal. Kehadiran HIPPAM “Banyu Biru” secara sosial sesungguhnya memegang peranan yang sangat krusial dalam menyediakan alternatif pemenuhan kebutuhan dasar air bersih komunal berbasis masyarakat di pedesaan, terutama seiring ditemukannya potensi titik sumber air baru di wilayah Desa Banjaran. Namun, tata kelola kelembagaan organisasi ini masih terjebak dalam pola manajemen konvensional dan longgar yang memicu defisit kompetensi sumber daya manusia serta penurunan keandalan infrastruktur fisik. Keterbatasan kapasitas administratif, absennya digitalisasi, lemahnya

pengawasan internal, serta tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku menjadi akar permasalahan yang secara linier menurunkan tingkat efektivitas pelayanan publik, ketepatan waktu respon operasional, hingga mengerosi tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat pelanggan secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai kinerja HIPPAM “Banyu Biru” di Desa Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti merumuskan beberapa saran alternatif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang:

1. HIPPAM “Banyu Biru” bersama Pemerintah Desa Banjaran perlu segera menyusun dan menetapkan SOP tertulis yang baku. SOP ini harus mencakup kejelasan alur kerja administratif, standarisasi waktu penanganan kerusakan teknis, mekanisme pengaduan pelanggan, serta pembagian tugas yang jelas bagi masing-masing pengurus agar roda organisasi tidak hanya bertumpu pada posisi inti.
2. Pengelola disarankan untuk mulai menghentikan pencatatan keuangan manual berbasis buku besar dan beralih menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital seperti Microsoft Excel atau aplikasi khusus pengelolaan HIPPAM “Banyu Biru”. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko salah hitung, meningkatkan transparansi keuangan, serta merapikan pengarsipan data keluhan pelanggan secara sistematis.

3. Untuk mengatasi masalah efektivitas, tim teknis seharusnya menjadwalkan patroli jaringan pipa secara berkala guna mendeteksi kebocoran sedini mungkin, menindak tegas sambungan ilegal, serta mengganti meteran air pelanggan yang sudah rusak. Pemerintah desa juga disarankan membantu pengalokasian dana desa untuk investasi penggantian atau perluasan pipa distribusi air.
4. Seharusnya diadakan musyawarah yang melibatkan pengelola, Pemerintah Desa, dan perwakilan masyarakat untuk mengevaluasi kembali struktur tarif air. Penyesuaian tarif yang rasional dan disepakati bersama dapat dialokasikan untuk meningkatkan insentif atau honor pengurus, sehingga para pengurus dapat lebih fokus dan berkomitmen meluangkan waktunya demi pelayanan HIPPAM “Banyu Biru” tanpa terganggu oleh pekerjaan sampingan mereka.
5. Pengelola disarankan membuka saluran komunikasi yang lebih mudah diakses oleh warga misalnya menyediakan nomor *WhatsApp* khusus atau kotak saran fisik. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan dan operasional seharusnya dilaporkan secara berkala dan transparan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa demi menjaga kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Fathoni, A., Suharin., & Wahyuni,ida. (2024). *Pengelolaan Air Untuk Kehidupan*. Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press.
- Gutenberg. (2011). *Guidelines for Drinking-water Quality*. Switzerland: World Health Organization.
- Haberman. Shelby J. (1979). *Analysis of Qualitative Data*. New York: Academic Press.
- Howard, G., Bartram, J., & Williams, A. (2020). *Domestic water quantity, service level and health*. Geneva: World Health Organization.
- Kodoatie, R.J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Spradley, James P. (1980). *Participant Observation*. United States: holt.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. United States: SAGE Publication.
- Novita, Yuliatr. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Paul, J. (2005). *Business Environment*. New Delhi: Tata McGraw Hill Education Private Limited.
- Rumawas, Wehelmina. (2021). *Manajemen Kinerja*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sianipar, Martin Yehezkiel. (2024). *Manajemen Kinerja: Mengurai Konsep Dan Menerapkan Teori*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.

Peraturan-Peraturan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

Website :

<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRIJKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>

<https://iif.co.id/id/berita/peran-iif-dorong-ketersediaan-akses-air-bersih-di-indonesia/>

<https://pangannews.id/berita/1735964563/bps-ungkap-736-persen-rumah-tangga-belum-nikmati-akses-air-minum-layak>

<https://suarabanyuurip.com/2023/06/23/ini-5-kecamatan-gunakan-air-pdam-terbanyak-di-bojonegoro/>

Jurnal-Jurnal :

Avessina, M. J., Bimo, W. A., & Firdaus, M. A. (2025). Collaboration on Rural Clean Water Governance: KPSPAM Institutional Capacity Strengthening and Professionalization Program in South Central Timor Regency. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 3(2), 74–80. <https://doi.org/10.32832/jpn.v3i2.109>

Bps, K. (2023). *Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023*. Jatim.Bps.Go.Id. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUU0eE4xbE9hMWhSVjNCSGNYaFpWRIJKUjFSTlp6MDkjMw==/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-sumber-air-minum-layak-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>

Daniel, D., Djohan, D., & Nastiti, A. (2021). Sanitation , and Hygiene (WASH) Services in Rural Indonesia : Evidence from Small Surveys of WASH-Related Stakeholders in Indonesia. *MDPI Stays Neutral with Regard to Jurisdictional Claims in Published Maps and Institutional Affiliations*, 13(314), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/w13030314>

Dinar, A., & Schwabe, K. (2015). How social capital influences community support for alternative water sources. *Handbook of Water Economics*, 219–220. <https://doi.org/10.4337/9781782549666.00019>

Effendy, R., Satriya, B., & Sadhana, K. (2025). Water Ethics for sustainable Rural Community-Based Water Service System in Malang Regency, Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 06(01), 137–146. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2025.1.10>

- Fadli, G. K., Fitriyah, & Astuti, P. (2023). INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMNET DI DESA (STUDI KEBERHASILAN DI DESA BANYUBIRU KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG). *Journal of Politic and Government Studies*, 4(1), 1–23.
- Finance, P. I. I. (2025). *Peran IIF Dorong Ketersediaan Akses Air Bersih di Indonesia*. Iif.Co.Id. <https://iif.co.id/id/berita/peran-iif-dorong-ketersediaan-akses-air-bersih-di-indonesia/>
- Gleick, P. H. (2003). Global Freshwater Resources: Soft-Path Solutions for the 21st Century. *Cephalalgia: An International Journal of Headache*, 302(November), 533–535. <https://doi.org/10.1177/03331024870070S6235>
- Gultom, D. A., Santa Rajagukguk, A., Pasaribu, A. G., Sitepu, A. S. B., & Sianipar, M. A. B. (2025). Hubungan Pengajaran Penulisan Karya Ilmiah Dengan Kemampuan Menuliskan Kajian Teori Berbasis KT & KPT Mahasiswa Semester 3 Grup D Prodi PAK. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 2645–2661.
- Hersch, R. W. (2012). Water quality for drinking: WHO guidelines. *Encyclopedia of Earth Sciences Series*, 876–883. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4410-6_184
- Howard, G., & Bartram, J. (2003). Domestic Water Quantity , Service Level and Health. In *World Health Organization*. http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/en/
- Kardina, M., & Syamsir, S. (2024). Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Model Pengukuran Kinerja dalam Konteks Administrasi Publik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4371–4374. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4181>
- Khurun'in, I., Simarmata, D. P., & Yudilastiantoro, C. (2024). Community-led Initiatives for Water Resource Management in Sumenep Regency, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 14(4), 675–683. <https://doi.org/10.29244/jpsl.14.4.675>
- Kobayashi, K. (2014). Community Based Water Management and Social Capital. In *Water Intelligence Online* (Vol. 13). <https://doi.org/10.2166/9781780405469>
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. (2010). *Tata Ruang Air*.
- Lutfia, L., Khasanah, A. U., & Hairani, A. (2024). Characteristics of Community-based Rural Water Supply System in Jambon Village, Kulon Progo City. *BIO Web of Conferences*, 144. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414403002>
- Machado, A. V. M., Oliveira, P. A. D., & Matos, P. G. (2022). Review of Community-Managed Water Supply—Factors Affecting Its Long-Term

- Sustainability. *Water* (Switzerland), 14(14).
<https://doi.org/10.3390/w14142209>
- Machado, A. V. M., Oliveira, P. A. D., Matos, P. G., & Santos, A. S. P. (2023). Strategies for Achieving Sustainability of Water Supply Systems in Rural Environments with Community Management in Brazil. *Water* (Switzerland), 15(12), 1–12. <https://doi.org/10.3390/w15122232>
- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- pangannews, pers. (2025). *BPS Ungkap 7,36 Persen Rumah Tangga Belum Nikmati Akses Air Minum Layak*. Pangannews.Id. <https://pangannews.id/berita/1735964563/bps-ungkap-736-persen-rumah-tangga-belum-nikmati-akses-air-minum-layak>
- Paul, J. (2005). *BUSINESS ENVIRONMENT text and cases*.
- Perwita Sari, D., Ikram, M. S., Indriana, D. R., Akbar, E. P., & Destria, C. (2025). Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Masjid Raudhatul Jannah Di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 8(3), 341–354. <https://doi.org/10.36341/jpm.v8i3.5985>
- Prüss-Ustün, A., Bartram, J., Clasen, T., Colford, J. M., Cumming, O., Curtis, V., Bonjour, S., Dangour, A. D., De France, J., Fewtrell, L., Freeman, M. C., Gordon, B., Hunter, P. R., Johnston, R. B., Mathers, C., Mäusezahl, D., Medlicott, K., Neira, M., Stocks, M., ... Cairncross, S. (2014). Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: A retrospective analysis of data from 145 countries. *Tropical Medicine and International Health*, 19(8), 894–905. <https://doi.org/10.1111/tmi.12329>
- Rogers, P., De Silva, R. D., & Bhatia, R. (2002). Water is an economic good: How to use prices to promote equity efficiency and sustainability. *Water Policy*, 4(1), 1–17. [https://doi.org/10.1016/S1366-7017\(02\)00004-1](https://doi.org/10.1016/S1366-7017(02)00004-1)
- Rumawas, W. (2021). *Manajemen Kinerja*.
- Saldaña Almazán, M., Leyva Zuñiga, A. P., Moreno Mendoza, E., Calderón Arellanes, M. P., & Suastegui Cruz, S. (2025). Community Management and Sustainability of Water Supply in a Rural Area of Guerrero, Mexico. *Sustainability* (Switzerland), 17(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su17104633>
- Samian. (2023). *Ini 5 Kecamatan Gunakan Air PDAM Terbanyak di Bojonegoro*. Suarabanyuurip.Com. <https://suarabanyuurip.com/2023/06/23/ini-5->

kecamatan-gunakan-air-pdam-terbanyak-di-bojonegoro/

- Shields, K. F., Moffa, M., Behnke, N. L., Kelly, E., Klug, T., Lee, K., Cronk, R., & Bartram, J. (2021). Community management does not equate to participation: Fostering community participation in rural water supplies. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*, 11(6), 937–947. <https://doi.org/10.2166/washdev.2021.089>
- Sobsey, M. D., Stauber, C. E., Casanova, L. M., Brown, J. M., & Elliott, M. A. (2008). Point of use household drinking water filtration: A practical, effective solution for providing sustained access to safe drinking water in the developing world. *Environmental Science and Technology*, 43(3), 970–971. <https://doi.org/10.1021/es8026133>
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tantoh, H. B., & Simatele, D. (2018). Complexity and uncertainty in water resource governance in Northwest Cameroon: Reconnoitring the challenges and potential of community-based water resource management. *Land Use Policy*, 75(February), 237–251. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.03.044>
- Telaumbanua, E., Halawa, F., Silitonga, D., Sukardi, Zega, Y., Mbate, C. A., Mendrofa, S. A., Hulu, F., Waruwu, M. H., Septiani, R., Lawi, A., Sundari, S., Trihardani, L., & Hasya, A. (2024). *MANAJEMEN KINERJA: MENGURAI KONSEP DAN MENERAPKAN TEORI* (martin yehezkiel Sianipar (ed.); 1st ed.).
- Thapa, D., Farid, M. N., & Prevost, C. (2022). Governance drivers of rural water sustainability: Collaboration in frontline service delivery. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 6(1). <https://doi.org/10.24294/jipd.v6i1.1380>
- Unrau, Y. A., Gabor, P. A., & Grinnell, R. M. (2007). *Evaluation in Social Work: The Art and Science of Practice*.
- Yasmin, R., Afzal, A., Ullah, S., & Javed, M. (2024). Determinants of Community Participation in Sustainable Management of Rural Water Supply System: Evidence from District Lahore, Pakistan. *Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(2), 86–94. <https://doi.org/10.55737/qjssh.379139395>